

Original Article

Strategi Komunikasi Lingkungan Kabupaten Bogor dalam Program Kampung Ramah Lingkungan

Isma Carissa Putri^{1✉}, Wininda Qusnul Khotimah², Yulia Rahmawati³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jalan Limau 2, RT.3/RW.3, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130, Indonesia

Correspondence Author: ismacarissaputri@uhamka.ac.id[✉]

Abstrack:

Masalah sampah, khususnya sampah plastik, telah menjadi isu lingkungan serius baik di tingkat global maupun lokal. Indonesia menempati peringkat kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbesar di dunia, dan Kabupaten Bogor termasuk salah satu wilayah dengan timbunan sampah harian yang tinggi. Kondisi ini perlu adanya strategi komunikasi lingkungan yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu mendorong partisipasi dan perubahan perilaku masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi lingkungan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dalam Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL). Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi DLH terbagi dalam dua fungsi utama menurut teori Robert Cox, yaitu fungsi pragmatis dan fungsi konstitutif. Fungsi pragmatis komunikasi melalui tatap muka, pemanfaatan media digital seperti *WhatsApp*, keberadaan pendamping lingkungan, sosialisasi rutin, dan pemberian penghargaan kepada kampung terbaik. Sementara itu, fungsi konstitutif terlihat dari transformasi makna sampah menjadi sumber daya ekonomi dan pembentukan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan. Meski demikian, hambatan seperti minimnya dukungan perangkat desa dan terbatasnya publikasi program menjadi tantangan tersendiri. Secara keseluruhan, strategi komunikasi DLH dalam Program KRL efektif dalam meningkatkan partisipasi serta membangun kesadaran masyarakat terhadap isu pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Keywords: Komunikasi Lingkungan, Kampung Ramah Lingkungan, Pengelolaan Sampah

Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki permasalahan tentang sampah yang cukup memprihatinkan. Dilansir dari *detikEdu* (Yulianti, 2024) Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Muhammad Reza Cordova mengatakan Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik ke-2 terbesar di dunia. (Jambeck dalam Asmara Dewi & Syaui, 2022) mengatakan bahwa *American Association for the Advancement of Science* melakukan penelitian kepada 192 negara,



salah satunya Indonesia. Penelitian itu menyebutkan bahwa Indonesia menyumbangkan 187,2 juta ton sampah ke laut. Sedangkan China mencapai 262,9 juta ton. Menurut Egan ([dalam Arni, 2020](#)) perilaku merusak lingkungan tidak akan disadari manusia sebelum bencana datang ke mereka.

Permasalahan lingkungan ini tidak hanya terjadi secara global yang dimana termuat dalam *Sustainable Development Goals* (SDG'S), tetapi juga sangat terasa pada tingkat lokal, salah satunya terjadi di Kabupaten Bogor, dimana isu tentang sampah menjadi salah satu isu utama yang dihadapi masyarakat. Di Kabupaten Bogor, timbunan sampah harian mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu sekitar 2.000-2.700 ton per hari ([Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, 2025](#)). Namun, kapasitas pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor masih sangat terbatas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor juga menunjukkan distribusi timbunan sampah yang signifikan meningkat di setiap kecamatan per tahunnya, menandakan perlunya penanganan yang lebih serius dan terintegrasi. Dampak serius dari permasalahan sampah, khususnya sampah plastik yang sulit terurai ini sangat luas. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari air, tanah dan udara, serta menambah emisi gas rumah kaca jika sampah plastik dalam pengelolaannya melakukan teknik pembakaran ([Nizar et al., 2025](#)).

Pada masalah ini komunikasi lingkungan menjadi program untuk menjawab pertanyaan mengenai isu – isu lingkungan. Cox dalam ([Irwanti & Prasetyo, 2020](#)) mengatakan bahwa Program komunikasi lingkungan ini tidak hanya menjadi alat pendukung untuk mengelola lingkungan tetapi juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan lingkungan, yang artinya tanpa komunikasi maka pengelolaan lingkungan akan menjadi masalah yang krusial.

Komunikasi lingkungan merupakan cabang ilmu akademik yang mempelajari cara komunikasi memengaruhi pandangan, sikap, dan tingkah laku manusia terhadap lingkungan. Ini meliputi teori, metode, serta penerapan praktis dalam berbagai situasi guna memahami dan menyelesaikan permasalahan lingkungan ([Aska et al., 2025](#)). Robert Cox dalam bukunya yang berjudul, *Environmental Communication and the Public Sphere* menjelaskan komunikasi lingkungan adalah media pragmatis dan konstitutif dalam memberikann pemahaman kepada masyarakat mengenai masalah lingkungan dan bagaimana cara menyelesaikannya ([Adhrianti, 2021](#)). Robert Cox juga menjelaskan bahwa komunikasi lingkungan adalah sub bidang ilmu komunikasi yang di dalamnya terdapat area studi yang berbeda atau interdisipliner. Meskipun demikian, pada dasarnya komunikasi lingkungan memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, fungsi pragmatis, yang mencakup peran dalam memberikan edukasi, peringatan, menggerakkan aksi, serta membujuk. *Kedua*, fungsi konstitutif, yaitu peran bahasa dan simbol-simbol lainnya dalam membentuk cara kita

Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Permasalahan tentang sampah merupakan salah satu yang menghambat suatu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bogor ([Nurfadhillah & Rahmawati, 2024](#)). Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup, telah berupaya melakukan pengelolaan sampah dengan menggunakan konsep komunikasi lingkungan, diantaranya program Kampung Ramah Lingkungan (KRL). Program ini dimulai oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tujuan program ini untuk mendorong partisipasi aktif, yang meliputi berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sampah, penghijauan, pemanfaatan sumber daya alam, hingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan. Menurut informasi yang dilansir dari *Diskominfo Kabupaten Bogor* di tahun 2024, telah terverifikasi ada 347 KRL yang tersebar di 39 Kecamatan se-Kabupaten Bogor dan hanya satu kecamatan yang tidak

mendaftarkan KRL yakni Kecamatan Gunung Sindur.

Penelitian tentang membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengelola sampah pernah dilakukan ([Cerya & Evanita, 2021](#)) yang menganalisa proses komunikasi masyarakat dalam upaya mengelola sampah rumah tangga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku lebih efektif dicapai melalui komunikasi personal dibandingkan dengan komunikasi massa. Meskipun komunikasi massa dapat meningkatkan pengetahuan, perubahan perilaku akan lebih signifikan jika dilakukan melalui pendekatan komunikasi personal. Lebih lanjut, masyarakat juga semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan mengelola sampah rumah tangga, yang tercermin dari tindakan seperti memilah sampah berdasarkan jenisnya dan membuang sampah di tempat yang telah ditentukan.

Penelitian lain dilakukan ([Shahreza, et al., 2020](#)) menitikberatkan pada komunikasi lingkungan pemangku kepentingan dalam upaya pengelolaan sampah pada bank sampah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah di komunitas bank sampah, proses komunikasi lingkungan melibatkan tiga pihak utama, yaitu pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup, pengepul, dan komunitas bank sampah itu sendiri. Ketiga pemangku kepentingan tersebut membentuk sebuah model komunikasi yang bersifat konvergen, di mana terjadi saling pengertian dan ketergantungan, sehingga menjadikan bank sampah sebagai isu publik yang penting dalam pengelolaan sampah.

Mengacu pada teori komunikasi lingkungan yang dikembangkan oleh Robert Cox, strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) dapat dianalisis melalui dua fungsi utama komunikasi, yaitu fungsi pragmatis dan konstitutif. Fungsi pragmatis tercermin dalam upaya memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui penyampaian pesan yang terencana dan berkesinambungan. Sementara itu, fungsi konstitutif terlihat dari bagaimana penggunaan bahasa dan simbol-simbol lingkungan dibentuk untuk membentuk cara pandang masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan mengurangi penggunaan plastik ([Adhrianti, 2021](#)). Program KRL juga masuk dalam ranah edukasi publik dan kampanye advokasi, yang merupakan bagian integral dari kajian komunikasi lingkungan dengan tujuan mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kondisi lingkungan yang lebih baik. Dengan demikian, teori komunikasi lingkungan ini menjadi kerangka yang relevan dalam menganalisis perancangan dan implementasi strategi komunikasi dalam program KRL sebagai respons terhadap permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini secara konteks pengelolaan lingkungan dan fokus penelitian memiliki pembaruan, peneliti akan membahas lebih dalam bagaimana strategi komunikasi lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi masalah lingkungan terutama sampah plastik pada program kampung ramah lingkungan (KRL).

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian mendalam dan terperinci tentang fenomena tertentu (kasus) John W. Creswell dalam ([Assyakurrohim et al., 2022](#)). Dalam hal ini peneliti lebih terfokus meneliti bagaimana strategi komunikasi lingkungan Kabupaten Bogor dalam mengatasi sampah plastik dalam program kampung ramah lingkungan.

Subjek penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor sebagai pelaku komunikasi lingkungan. Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan wawancara mendalam kepada Ketua Tim Kemitraan Peran Masyarakat, sebagai informan kunci serta Bidang Pengelolaan Persampahan sebagai informan pendukung serta informan lainnya yang nantinya melengkapi data penelitian menggunakan metode

penentuan informan *Snowball Sampling*. Peneliti juga menggunakan observasi partisipatif atau melakukan pengamatan dengan berperan aktif serta dokumentasi.

Untuk menguji data yang dikumpulkan peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Patton mengatakan triangulasi data merupakan usaha membandingkan serta mengecek kembali suatu kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif ([moleong dalam Istiyanto & Novianti, 2018](#)) sumber data yang digunakan adalah data dari wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan tujuan utama penelitian ini, peneliti ingin mendalami serta menganalisis secara menyeluruh bagaimana proses komunikasi lingkungan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL). Program ini merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan lingkungan, khususnya terkait pengelolaan sampah yang menjadi isu krusial di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam kerangka teoritis, penelitian ini mengacu pada konsep komunikasi lingkungan yang dikemukakan oleh ([Cox, 2013](#)). Menurut Cox, komunikasi lingkungan pada dasarnya memiliki dua fungsi pokok yang saling melengkapi, yaitu fungsi pragmatis dan fungsi konstitutif. Fungsi pragmatis berkaitan erat dengan peran komunikasi dalam menyampaikan edukasi, memberikan peringatan, menggerakkan aksi nyata, serta membujuk masyarakat agar terlibat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Sementara itu, fungsi konstitutif lebih menyoroti bagaimana bahasa, simbol, dan pesan-pesan lingkungan membentuk cara pandang, persepsi, serta pemahaman masyarakat terhadap realitas dan permasalahan lingkungan yang dihadapi.

Melalui penelitian ini, diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan komunikasi lingkungan oleh DLH Kabupaten Bogor dalam Program Kampung Ramah Lingkungan, yang secara nyata dapat dikategorikan ke dalam dua fungsi utama tersebut. Peneliti menemukan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh DLH tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi secara satu arah, namun juga mengedepankan interaksi dua arah, partisipasi aktif masyarakat, serta penggunaan berbagai media komunikasi yang relevan dengan kebutuhan lokal. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi menunjukkan adanya berbagai upaya yang dilakukan DLH untuk mengedukasi masyarakat, membangun jejaring komunikasi, serta menanamkan nilai-nilai lingkungan melalui pendekatan yang bersifat pragmatis maupun konstitutif.

Secara lebih rinci, hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa fungsi pragmatis komunikasi lingkungan tercermin dalam berbagai kegiatan edukasi, sosialisasi, pelatihan teknis, hingga pemberian motivasi kepada masyarakat agar terlibat langsung dalam pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Di sisi lain, fungsi konstitutif tampak dari upaya DLH dalam membangun paradigma baru tentang sampah, mengubah persepsi masyarakat terhadap nilai sampah, serta menciptakan simbol-simbol dan narasi lingkungan yang mampu membentuk kesadaran kolektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi lingkungan dijalankan secara strategis oleh DLH Kabupaten Bogor, serta bagaimana kedua fungsi utama komunikasi lingkungan tersebut diimplementasikan dalam konteks Program Kampung Ramah Lingkungan.

Adapun hasil-hasil temuan penelitian yang telah dikategorisasikan ke dalam dua fungsi komunikasi lingkungan, yaitu fungsi pragmatis dan fungsi konstitutif, akan dijelaskan secara detail pada bagian berikut ini :

Fungsi Pragmatis

1. Pendekatan Langsung dan Melalui Media *Whatsapp*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa metode komunikasi langsung, baik melalui pertemuan tatap muka maupun pemanfaatan media komunikasi digital seperti *WhatsApp*, memiliki efektivitas

yang jauh lebih tinggi dalam mendukung edukasi dan mobilisasi masyarakat terkait pengelolaan sampah, dibandingkan dengan penyebaran informasi melalui media massa konvensional. Komunikasi langsung memungkinkan terjadinya interaksi dua arah yang intens, sehingga pesan-pesan mengenai pentingnya pengelolaan sampah dapat diterima secara lebih personal dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Penggunaan *WhatsApp* sebagai media komunikasi digital terbukti sangat membantu dalam mempercepat arus informasi. Melalui grup *WhatsApp* yang melibatkan pengurus RT, RW, PKK, serta kader lingkungan, pesan-pesan tentang pengelolaan sampah dapat disebarluaskan dengan cepat dan efisien. Tidak hanya itu, grup ini juga menjadi ruang diskusi aktif di mana anggota masyarakat dapat bertanya, berbagi pengalaman, serta mendiskusikan kendala yang mereka hadapi secara langsung. Dengan adanya komunikasi yang interaktif dan responsif, masyarakat merasa lebih didampingi dan termotivasi untuk terlibat dalam program pengelolaan sampah di lingkungannya. Selain itu, solusi atas permasalahan yang muncul pun dapat segera diberikan oleh pendamping lingkungan atau petugas dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sehingga proses penanganan masalah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain komunikasi digital, pertemuan tatap muka seperti sosialisasi di balai desa, rapat rutin warga, atau forum diskusi lingkungan juga memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dan pihak pengelola program. Melalui pertemuan langsung, pesan-pesan yang disampaikan dapat diklarifikasi secara langsung, sehingga mengurangi risiko terjadinya miskomunikasi atau salah tafsir. Interaksi tatap muka juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran secara terbuka, yang pada akhirnya meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif dalam program lingkungan.

Lebih jauh lagi, komunikasi langsung baik secara digital maupun tatap muka mampu menciptakan hubungan yang lebih erat antara masyarakat dengan para pendamping lingkungan. Hubungan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan, meningkatkan motivasi, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pendekatan komunikasi yang bersifat personal dan interaktif terbukti lebih efektif dalam menggerakkan aksi nyata masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan, dibandingkan dengan pendekatan yang hanya mengandalkan media massa yang cenderung satu arah dan kurang interaktif.

2. Program "Pendamping Lingkungan Hidup"

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program "Pendamping Lingkungan Hidup" yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor di setiap kecamatan terbukti menjadi salah satu strategi utama yang sangat efektif dalam mendukung keberhasilan Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL). Pendamping lingkungan ini dipilih dan ditugaskan secara khusus untuk hadir secara aktif di tengah masyarakat, sehingga mereka tidak hanya menjalankan tugas administratif di balik meja, melainkan benar-benar terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi secara intensif dengan warga di tingkat komunitas.

Keberadaan para pendamping lingkungan menjadi ujung tombak dalam proses edukasi, sosialisasi, dan pendampingan masyarakat terkait pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Mereka memiliki peran yang sangat multifungsi, mulai dari sebagai fasilitator yang membantu masyarakat memahami tujuan dan manfaat program KRL, hingga sebagai edukator yang memberikan pelatihan teknis, seperti pemilahan sampah, pembuatan kompos, serta pengelolaan limbah

anorganik menjadi barang bernilai ekonomi. Melalui berbagai pelatihan dan bimbingan yang dilakukan secara rutin, pendamping lingkungan mampu meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah, sehingga tercipta perubahan perilaku yang lebih positif dan berkelanjutan.

Pendamping lingkungan juga berperan sebagai motivator yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Mereka tidak hanya memberikan arahan dan contoh nyata, tetapi juga membangun semangat gotong royong serta rasa kepemilikan bersama terhadap program lingkungan. Pendekatan yang bersifat persuasif dan komunikatif ini terbukti mampu meningkatkan antusiasme warga untuk terlibat dalam berbagai kegiatan lingkungan, seperti kerja bakti, pemilahan sampah, hingga pengelolaan bank sampah di tingkat RT/RW.

Selain itu, pendamping lingkungan juga memainkan peran penting sebagai jembatan komunikasi antara DLH dan masyarakat. Mereka menjadi penghubung yang menyalurkan informasi, kebijakan, serta inovasi dari DLH kepada masyarakat, sekaligus menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kendala yang dihadapi warga kepada pihak DLH. Dengan demikian, setiap permasalahan yang muncul di lapangan dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara cepat dan tepat. Pendamping lingkungan juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program KRL di wilayah tugasnya, sehingga perkembangan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dapat terpantau dengan baik dan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan program ke depan.

3. Sosialisasi Rutin Kepada *Stakeholder*

DLH secara rutin mengadakan sosialisasi mingguan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti UPT (Unit Pelaksana Teknis), PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), RT, RW, dan kepala desa. Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen bersama dalam pengelolaan sampah. Dalam setiap pertemuan, disampaikan informasi terbaru mengenai teknik pengelolaan sampah, pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya, serta bahaya sampah plastik bagi lingkungan. Sosialisasi ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman dan *best practice* antar *stakeholder*, sehingga tercipta jejaring kerja yang solid dalam mendukung keberhasilan program KRL.

Proses komunikasi lingkungan yang diterapkan melibatkan tiga pihak utama yakni Dinas Lingkungan Hidup, Perangkat desa, dan Masyarakat. Hasil dari program sosialisasi dari DLH ini membentuk sebuah model komunikasi yang bersifat konvergen, hal ini selaras dengan penelitian dari ([Shahreza et al., 2020](#)) dimana komunikasi yang terjadi antara pemangku kepentingan ini menciptakan ketergantungan, sehingga isu lingkungan dan pembentukan kampung ramah lingkungan menjadi isu yang diperhatikan bersama-sama tidak satu pihak saja.

4. Penghargaan Kepada Kampung Ramah Lingkungan terbaik

Sebagai salah satu bentuk penghargaan dan upaya untuk memotivasi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor secara rutin menyelenggarakan program pemberian penghargaan bagi Kampung Ramah Lingkungan (KRL) terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada kampung-kampung yang dinilai berhasil menerapkan praktik pengelolaan sampah secara inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Penilaian dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, seperti keberhasilan dalam mengurangi volume sampah, kreativitas dalam mendaur ulang, serta keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya penghargaan ini, DLH berharap dapat memberikan apresiasi nyata kepada kampung yang telah menunjukkan komitmen dan prestasi dalam pengelolaan lingkungan.

Lebih dari sekadar bentuk apresiasi, pemberian penghargaan ini juga berdampak positif dalam menciptakan iklim kompetisi sehat antar kampung di Kabupaten Bogor. Kampung-kampung lain terdorong untuk meningkatkan upaya mereka dalam pengelolaan sampah agar dapat meraih penghargaan serupa di masa mendatang. Kompetisi yang tercipta ini tidak hanya memacu inovasi dan kreativitas, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong serta rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Dengan demikian, program penghargaan ini menjadi salah satu strategi efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Penelitian ([Mustafa, 2017](#)) juga membuktikan bahwa pemberian insentif/penghargaan terhadap kinerja seseorang mampu untuk meningkatkan semangat dan gairah kinerja pegawai dan dalam konteks penelitian ini mampu untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam berlomba secara sehat dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Fungsi Konstitutif

1. Mengubah makna sampah yang buruk menjadi memiliki nilai jual
Berdasarkan hasil penelitian, salah satu capaian penting dari pelaksanaan Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) di Kabupaten Bogor adalah terjadinya perubahan cara pandang masyarakat terhadap sampah. Jika sebelumnya sampah identik dengan sesuatu yang kotor, tidak diinginkan, dan hanya dianggap sebagai limbah yang harus segera dibuang, kini persepsi tersebut mulai bergeser secara signifikan.

Transformasi makna ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses dari adanya nama "Bank Sampah" menjadi awal perubahan perspektif dari sampah yang memiliki makna buruk menjadi sampah yang mempunyai nilai jual.

2. Sampah Menjadi Penggerak Ekonomi Desa
Surya mengatakan bahwa terjadi lonjakan partisipasi masyarakat yang tinggi ketika mengetahui bahwa sampah bisa menjadi penggerak ekonomi di desa terutama dalam lingkup keluarga. Hal ini terjadi karena upaya Sosialisasi program Kampung Ramah Lingkungan ini bergerak bukan hanya untuk mengurangi sampah tetapi mengubah sampah menjadi komoditas baru.

Tanda yang dibuktikan dari perubahan paradigma tentang sampah ini adalah masyarakat mulai menjual barang-barang dari sampah, seperti Sarung *Tissue*, Gaun dari sampah yang didaur ulang, ada pembuatan bata dari sampah, pembuatan pupuk kompos dari sampah organik, adanya bank sampah, dan pemanfaatan pekarangan rumah untuk aktivitas perkebunan.

Hambatan dalam komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Divisi Penanganan Pencemaran dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, ditemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam mengomunikasikan program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) adalah minimnya dukungan dari perangkat desa. Hambatan ini terutama datang dari kepala desa yang belum sepenuhnya menyetujui pelaksanaan program KRL di wilayahnya. Menurut keterangan Surya, salah satu alasan utama kepala desa enggan terlibat aktif adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Banyak kepala desa merasa bahwa tanpa dukungan dana yang memadai, sulit bagi mereka untuk membentuk dan mengelola Kampung Ramah Lingkungan secara optimal. Hal ini menjadi kendala serius mengingat peran perangkat desa sangat vital dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput.

Selain itu, DLH Kabupaten Bogor sendiri memang tidak memberikan bantuan materi secara langsung kepada setiap RW yang mengikuti program KRL. Namun

demikian, DLH tetap berupaya memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Bantuan ini meliputi alat-alat pengelolaan sampah, fasilitas pendukung kegiatan lingkungan, serta pelatihan teknis bagi kader lingkungan. Meski tidak berupa dana tunai, dukungan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan perangkat desa dalam menjalankan program KRL, meskipun pada kenyataannya, keterbatasan anggaran tetap menjadi isu yang belum sepenuhnya teratasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh ([Ramdhani & Anisa, 2017](#)) menyatakan bahwa Pengelolaan anggaran yang baik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut bisa diartikan jika pengelolaan anggaran kurang baik maka kinerja pemerintah daerah menjadi kurang maksimal.

Hambatan lain yang teridentifikasi dalam proses komunikasi program KRL adalah masih terbatasnya jangkauan publikasi program. Sampai saat ini, DLH lebih banyak memanfaatkan media internal seperti website resmi untuk mensosialisasikan program Kampung Ramah Lingkungan. Cara ini memang efektif untuk kelompok tertentu, namun kurang mampu menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Sementara itu, beberapa kampung menunjukkan inisiatif yang lebih tinggi dengan secara aktif mengundang media massa, termasuk stasiun televisi, untuk meliput kegiatan mereka. Bahkan, menurut Surya, ada kampung yang berhasil menarik kunjungan wisatawan dari luar daerah hingga luar provinsi berkat inovasi pengelolaan lingkungannya. Meskipun demikian, upaya-upaya ini masih belum cukup untuk memperluas eksposur program KRL secara signifikan di tingkat regional maupun nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam komunikasi program Kampung Ramah Lingkungan di Kabupaten Bogor terletak pada kurangnya dukungan perangkat desa akibat keterbatasan anggaran, serta publikasi program yang masih terbatas pada media internal. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan keberhasilan program, diperlukan strategi yang lebih inklusif, baik dalam hal pelibatan perangkat desa maupun perluasan jangkauan publikasi melalui kolaborasi dengan media eksternal dan pemanfaatan berbagai platform komunikasi yang lebih variatif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai strategi komunikasi lingkungan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor dalam Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL), dapat disimpulkan bahwa komunikasi lingkungan memegang peranan sangat penting dalam upaya pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan di tingkat lokal. Strategi komunikasi yang dijalankan oleh DLH terbukti efektif karena mampu mengintegrasikan dua fungsi utama komunikasi lingkungan, yaitu fungsi pragmatis dan fungsi konstitutif sebagaimana dikemukakan oleh Cox (2013).

Secara pragmatis, DLH Kabupaten Bogor menerapkan pendekatan komunikasi yang bersifat langsung dan interaktif, baik melalui pertemuan tatap muka maupun pemanfaatan media digital seperti WhatsApp. Pendekatan ini memudahkan penyebaran informasi, edukasi, serta koordinasi antarwarga dan stakeholder, sehingga pesan-pesan tentang pengelolaan sampah dapat diterima dan dipahami dengan lebih baik oleh masyarakat. Selain itu, keberadaan program “Pendamping Lingkungan Hidup” di setiap kecamatan menjadi strategi kunci yang mampu memperkuat edukasi, pendampingan teknis, serta motivasi masyarakat dalam menjalankan praktik pengelolaan sampah yang benar. Program ini juga didukung oleh kegiatan sosialisasi rutin kepada berbagai stakeholder serta pemberian penghargaan kepada kampung yang berhasil menerapkan praktik ramah lingkungan, yang secara nyata mendorong partisipasi dan inovasi di tingkat komunitas.

Dari sisi konstitutif, strategi komunikasi lingkungan DLH Kabupaten Bogor berhasil membangun paradigma baru di masyarakat mengenai sampah. Melalui edukasi berkelanjutan, masyarakat tidak lagi memandang sampah sebagai sesuatu yang kotor dan tidak berguna, melainkan sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Perubahan makna ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memilah, mengumpulkan, dan memanfaatkan sampah, bahkan menjadikannya sebagai peluang ekonomi baru melalui program bank sampah dan daur ulang. Selain itu, penggunaan simbol, narasi, dan bahasa yang tepat dalam komunikasi lingkungan turut membentuk kesadaran kolektif dan nilai-nilai baru di masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Namun demikian, Program KRL ini juga menemukan beberapa hambatan, seperti kurangnya dukungan dari perangkat desa akibat keterbatasan anggaran, serta publikasi program yang masih terbatas pada media internal DLH. Meskipun beberapa kampung telah melakukan inovasi dengan melibatkan media massa dan menarik kunjungan dari luar daerah, upaya promosi program KRL secara lebih luas masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi lingkungan yang diterapkan oleh DLH Kabupaten Bogor dalam Program Kampung Ramah Lingkungan telah berhasil mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kesadaran lingkungan yang lebih baik. Keberhasilan ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengembangkan komunikasi lingkungan yang efektif, dengan mengedepankan pendekatan pragmatis dan konstitutif secara seimbang serta melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

Saran

1. Meningkatkan Dukungan Perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Bogor sebaiknya memperkuat sinergi dengan perangkat desa agar pelaksanaan Program Kampung Ramah Lingkungan (KRL) berjalan lebih optimal dan merata di seluruh kecamatan, mengingat masih ada keterbatasan dukungan di tingkat desa.
2. Memperluas Jangkauan Publikasi Program, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu memperluas publikasi dan sosialisasi terkait program KRL melalui berbagai media, baik digital maupun konvensional, agar informasi mengenai pengelolaan sampah dan pentingnya partisipasi masyarakat dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
3. Mengembangkan Inovasi dan Kompetisi Berkelanjutan, Pemerintah daerah dapat rutin mengadakan penghargaan atau lomba inovasi pengelolaan sampah antar kampung untuk memotivasi masyarakat berinovasi dan menciptakan kompetisi sehat yang mendorong terciptanya kampung ramah lingkungan secara berkelanjutan.

Referensi

- Adhrianti, L. (2021). Komunikasi Bagi Pelestarian Mangrove: Telaah pada Konsep Pengemasan Pesan Ramah Lingkungan di Kawasan Wisata Hutan Mangrove Kota Bengkulu. In *KOMUNIKASI LINGKUNGAN Essay Pengalaman Tentang Isu Lingkungan di Indonesia* (p. 58). COSDEV Pusat Kajian Komunikasi dan Pembangunan Berkelanjutan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila.
- Arni. (2020). Komunikasi Lingkungan: Antara Literasi Lingkungan dan Inovasi. *Jurnal Komunikasi Dan Organisasi (J-KO)*, 2(2), 74–82.
- Aska, F., Rahmawati, Y., & Khotimah, W. (2025). *Strategi Komunikasi Lingkungan Dietplastik Indonesia : Program Gerakan Guna Ulang Jakarta dalam Mengurangi Plastik Sekali Pakai*. 16(1), 129–145.
- Asmara Dewi, W. W., & Syauki, W. R. (2022). Pesan Kampanye Non-Government Organization terhadap Permasalahan Sampah Plastik. *Jurnal Riset Komunikasi*, 5(2), 159–171. <https://doi.org/10.38194/jurkom.v5i2.428>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor. (2025). *Jumlah Timbunan Sampah Menurut Kecamatan, 2023-2024*. <https://bogorkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjAyIzI=/jumlah-timbunan-sampah-menurut-kecamatan.html>.

- Cerya, E., & Evanita, S. (2021). Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Membangun Kepedulian Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(2), 136. <https://doi.org/10.29210/3003977000>
- Cox, R. (2013). *Environmental Communication and Public Sphere (3rd Editio)*. SAGE Publications, Inc.
- Hartoyo, R., & Sulistyowati, S. (2023). The Role Of The Legal Aid Post Is In Providing Legal Assistance To Disadvantaged People In Order To Obtain Justice In The Courts Of The Holy Land. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1599–1611. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25236>
- Irwanti, M., & Prasetyo, T. (2020). Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Mengolah Sampah Rumah Tangga. *Prosiding Seminar Nasional "Pembangunan Hijau Dan Perizinan: Diplomasi, Kesiapan Perangkat Dan Pola Standarisasi,"* 1(1), 157–164.
- Istiyanto, S. B., & Novianti, W. (2018). Etnografi Komunikasi Komunitas yang Kehilangan Identitas Sosial dan Budaya di Kabupaten Cilacap. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 64. <https://doi.org/10.24198/jkk.v6i1.15213>
- Ismail, I., Putri, R. S., Zulfadhli, Z., Mustofa, A., Musfiana, M., & Hadiyani, R. (2022). Student Motivation to Follow the Student Creativity Program. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 5(2), 351–360. <https://doi.org/10.24815/jr.v5i2.27641>.
- Jumadi, J. (2023). Revitalisasi Nilai Budaya Suku Cerekang Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 815–821. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24919>
- Mustafa, I. G. (2017). Studi Tentang Pemberian Insentif Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Paradigma (JP)*, 1(3), 373. <https://doi.org/10.30872/jp.v1i3.315>.
- Nizar, M., Putra, A., Zahrani, N. A., Zahra, T. A., Bella, B. C., Hariyadi, A. G., Fadhila, D. S., Akrom, S., Abiyyu, A., Rini, R., & Firdausi, K. (2025). *Sampah Plastik sebagai Ancaman terhadap Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta , Indonesia*. 2(1), 154–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.725>
- Nurfadhillah, A., & Rahmawati, R. (2024). *Analisis Ketidakefektifan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bogor Melalui Lensa Teori Struktural Fungsionalisme Analysing the Ineffectiveness of Waste Management in Bogor District Through the Lens of Structural Functionalism Theory*. 7(1), 2715–2499.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1), 134–148. <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i1.4223>.
- Shahreza, M., Sarwoprasodjo, S., Arifin Susilo, H., & Hapsari Reno, D. (2020). *Komunikasi Lingkungan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah di Tangerang Selatan*. 23(2), 113–128. <https://doi.org/10.20422/jpk.v23i2.721>
- Yulianti, C. (2024). "Indonesia Jadi Penyumbang Sampah Plastik Terbesar ke-2 di Dunia." DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7536226/indonesia-jadi-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-ke-2-di-dunia-ini-penyebabnya>.